

Analisis Politik Jelang Pemilukada OKU 2015

POLEMIC politik yang cukup panjang tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) usai sudah. Penanda usainya polemik itu adalah ketika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1/2014 yang dikeluarkan oleh rezim Presiden SBY, disahkan dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1/2015.

Titik krusial polemik politik itu berawal dari tesis emosional para politisi, bahwa pemilukada langsung melahirkan banyak "mudarat" baik secara sosial maupun politik. Sehingga, dengan upaya politik juga, faksi-faksi politik di DPR RI periode 2009-2014, di ujung masa baktinya "menggiring" pelaksanaan pemilukada kembali dipilih oleh DPRD.

Gerakan politik yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang kalah di Pilpres 2014, serta manuver politik *walkout*-nya Fraksi Partai Demokrat (FPD) yang mengklaim diri sebagai penyeimbang menyebabkan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak mampu membendung "penjegalan" terhadap pemilukada langsung dipertahankan. Pemilukada pun akhirnya ditetapkan menjadi tidak langsung dalam sidang paripurna DPR yang penuh dengan drama politik itu.

Namun, kini drama politik penuh polemik itu sudah berakhir. Pemilukada sudah ditetapkan kembali dipilih secara langsung dengan pengesahan Perppu No 1/2014 menjadi UU No 1/2015. Sebelum pengesahan memang masih terjadi tarik-menarik politik yang cukup kencang terkait dengan beberapa pasal

krusial. Seperti batasan (kanan, kiri, atas, bawah) pelarangan pencalonan bagi keluarga dekat petahana (*incumbent*), yaitu istri, anak, adik, kakak, menantu, dan keponakan selama sepuluh tahun setelah si *incumbent* tidak lagi menjabat.

Batasan usia kandidat, dari 25 tahun menjadi 30 tahun untuk calon bupati dan wali kota, batas dukungan parpol yang dinaikkan dari 15 persen menjadi 20 persen, dukungan KTP bagi calon independen yang dinaikkan 3,5 persen, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) berpotensi tidak lagi menjadi penyelenggara, ada mekanisme uji publik bagi para calon serta calon kepala daerah tidak lagi berpasangan (paket) tapi wakil kepala daerah ditunjuk oleh bupati, wali kota, dan gubernur terpilih, yang jumlah wakilnya disesuaikan dengan jumlah penduduk.

Proses politik akhirnya melahirkan revisi yang disepakati bersama, batas usia minimal calon bupati/wali kota kembali ditetapkan 25 tahun, gubernur tetap 30 tahun, batas bagi keluarga dekat *incumbent* yang mau maju disepakati tetap 10 tahun, dukungan parpol 20 persen dari total perolehan suara sah, dukungan KTP bagi calon independen naik 3,5 persen, tidak ada uji publik bagi para calon, KPUD tetap sebagai penyelenggara, pemilihan kepala daerah tetap berpasangan (satu paket), dan ambang batas kemenangan adalah nol persen, artinya selisih berapa pun, pemilukada akan berlangsung hanya satu putaran.

Lalu bagaimana peta perpolitikan di Kabupaten Ogan



OLEH

HENDRA ALFANI, S.SOS., M.J.KOM*

Komerling Ulu, pasca disahkannya UU No 1/2015? Mesin politik sudah mulai dipanaskan, bahkan jauh hari sebelum kemelut politik pengesahan UU Pemilukada berlangsung, empat nama muncul ke publik dan menyatakan akan maju dalam pemilukada OKU 2015. Drs Johan Anuar SH MM (ketua DPRD OKU), Drs H Kuryana Aziz (Plt Bupati OKU), Hj Percha Leapuri BBus MBA (anggota DPD RI), dan Drs H Farouk Bary MSi (pensiunan PNS) muncul ke permukaan dan mulai bersosialisasi. Tentu, masih akan ada lagi nama yang muncul, tetapi sekarang (mungkin) masih memantau perkembangan situasi.

Kabar serta isu politik semakin hangat beredar terkait dengan mengencangnya konstelasi politik lokal ini. Baik dari kalangan jurnalis, forum LSM, ormas, OKP, akademisi, bahkan di kalangan birokrasi (yang kabarnya "mulai" terbelah), peta politik jelang pemilukada OKU makin terasa nuansanya. *Ibarat kate; pempek tambah kecek, tapi*

cukenya tambah pedas. Bahkan kencang berembus kabar, di antara nama tokoh yang muncul telah terjadi lobi-lobi politik awal yang (mungkin) sifatnya penjajakan.

Kuryana Aziz sebagai *incumbent*, bahkan sempat menyatakan mengurungkan niatnya untuk maju dalam pemilukada OKU 2015, karena tidak mendapat restu dari keluarga dekatnya, dan membangun kesan akan memberikan kesempatan kepada generasi yang lebih muda untuk maju. Namun, pasca ditetapkannya UU No 1/2015, jika mencermati gerakan dan kebijakannya sebagai Plt Bupati OKU, keputusannya tak jadi maju yang pernah disampaikan kepada publik beberapa waktu lalu, sepertinya masih harus dicermati dengan seksama.

Johan Anuar (sekarang Ketua DPRD OKU) *slow* tapi pasti, sepertinya mantap maju. Kepastian itu muncul dalam pernyataan-pernyataan politiknya di media massa lokal dan dalam pertemuan dengan berbagai kalangan masyarakat. Johan yang juga Ketua DPD Partai Golkar OKU sepertinya tengah mempersiapkan mesin politik dengan "cc" besar untuk memenangi pemilukada OKU 2015. Advertorial politiknya juga sudah mulai mewarnai halaman utama media massa lokal, demikian juga dengan spanduk, *banner* ataupun baliho dengan *jingle* "Tegas, Berani dan Rakyat" sudah mulai menyebar di seluruh wilayah OKU.

Sementara Percha Leapuri (puteri sulung Bupati OKU Timur H Herman Deru) juga sejak jauh hari sudah

mempersiapkan "mesin pengangkut air" untuk bertarung dalam pemilukada OKU. Sosialisasinya semakin kencang menemui masyarakat di kantong-kantong pemilih, baik di kecamatan maupun di desa-desa. Advertorial politiknya juga sudah mulai mewarnai halaman utama media massa lokal, demikian juga dengan spanduk, *banner* ataupun baliho dengan *jingle* "OKU Bangkit" sudah tersebar luas.

Politik memang selalu bergerak dinamis. Tak ada yang mampu memastikan kemana perahu berlabuh, sebelum tahapan pemilukada dimulai bulan April-Mei, menuju pelaksanaan bulan Desember 2015 nanti. "Cinta satu malam" atau bahkan "kawin paksa" dalam politik (seperti kasus Pilgub Sumsel 2013), dapat saja merubah konstelasi politik dalam waktu singkat. Jadi kita tunggu saja, biarlah waktu yang menjawabnya.

Genderang kompetisi politik sudah mulai ditabuh. Sebagai bagian dari masyarakat OKU, kita hanya bisa berharap bahwa pemilukada OKU 2015 akan berlangsung secara demokratis, aman, dan bermartabat. Yang kalah berlapang dada dan menerima kekalahan secara kesatria. Yang menang tak jumawa, dan memaknai kemenangannya nanti sebagai kemenangan bersama, menjadi pemimpin yang amanah bagi kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat OKU di masa yang akan datang. Semoga! (*)

*) Pengajar di FISIP UNBARA dan Direktur Eksekutif Lingkar Prakarsa Institute